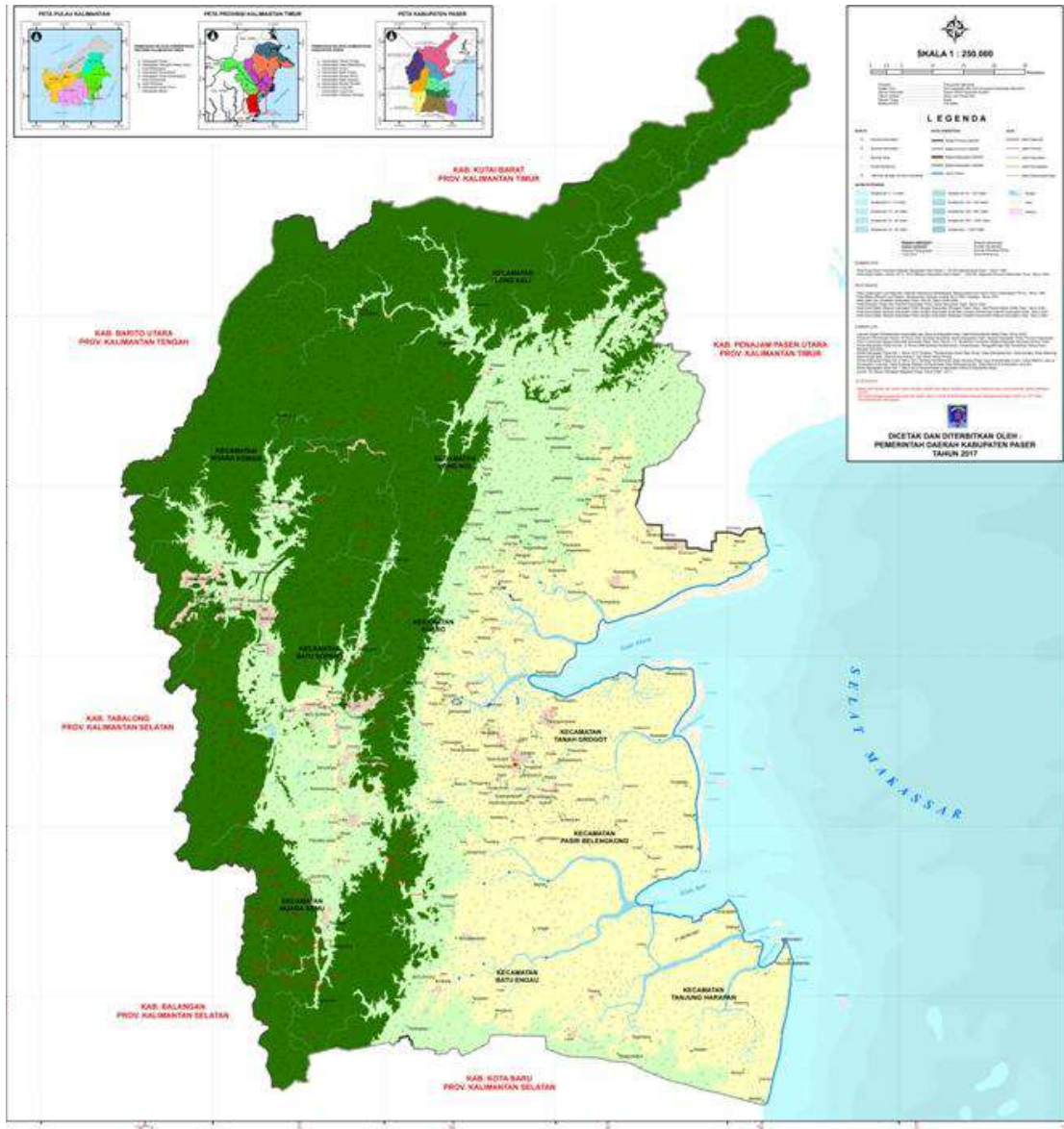


# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) TAHUN 2021



## **DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER**

Kompleks Perkantoran Gedung A, Lantai 2 Kavling 1  
Jln. Kusuma Bangsa KM 05 Tepian Batang Tana Paser  
Kode Pos 76211

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah, swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2021 dapat diselesaikan. LKjIP ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali dan pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2021.

Pemerintah Kabupaten Paser sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki komitmen besar terhadap pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut tertuang dalam Visi pembangunan Daerah Kabupaten Paser periode RPJMD 2016-2021 yaitu “ **Mewujudkan Kabupaten Paser yang maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan** ”. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan satu visi yang menjadi urusan Dinas Kesehatan yaitu “ **Mewujudkan masyarakat Kabupaten Paser Sehat Yang Mandiri, Merata dan Berkeadilan**”. selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser

Tahun 2016 - 2021 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 berfungsi sebagai pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2020.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2021 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Paser.

**Tana Paser, 28 Januari 2021**

Kepala Dinas,



**dr. I Dewa Made Sudarsana, MAP**  
**NIP. 196311231995091002**

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GAMBAR/TABEL .....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	vii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
1.3.Struktur Organisasi .....	4
1.4.Sumber Daya Manusia .....	5
1.5.Sarana dan Prasarana .....	14
1.6.Permasalahan dan Hambatan.....	15
1.7.Sistimatika Penyajian .....	16
<b>BAB II    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1.Rencana Strategis .....	18
2.2.Rencana Kerja Tahunan (RKT) .....	26
2.3.Perjanjian Kinerja .....	36
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1.Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja.....	39
3.2.Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja.....	41
3.3.Realisasi Anggaran .....	55
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
4.1.Kesimpulan .....	64
4.2.Upaya Pemecahan Masalah .....	64

## DAFTAR/GAMBAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2020 .....	4
Gambar 1.2 Pengelompokan rumpun dan jumlah tenaga kesehatan dalam wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2020 .....	5
Gambar 1.3 Jumlah dokter spesialis di RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser Tahun 2020.....	6
Gambar 1.4 Jumlah dokter umum menurut puskesmas, labkesda, RSUD Panglima Sebaya, RS Pratama Kerang di Kabupaten Paser Tahun 2020 .....	7
Gambar 1.5 Jumlah dokter gigi menurut puskesmas, labkesda, RS di Kabupaten Paser Tahun 2020 .....	8
Gambar 1.6 Jumlah perawat menurut puskesmas, labkesda, RS di Kabupaten Paser Tahun 2020 .....	9
Gambar 1.7 Jumlah bidan menurut puskesmas, labkesda, RS di Kabupaten Paser Tahun 2020 .....	10
Gambar 1.8 Jumlah tenaga promotif dan preventif menurut puskesmas, labkesda, perbekalan obat dan alkes di Kabupaten Paser Tahun 2020 .....	11
Gambar 1.9 Jumlah tenaga kesehatan non PNS (PTT) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2020 .....	13
Gambar 1.10 Jumlah asisten tenaga kesehatan non PNS (PTT) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2020 .....	13
Tabel 1.11 Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Kesehatan Tahun 2020 .....	14
Tabel 2.1 Linearitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kab. Paser Tahun 2021 .....	20
Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Paser .....	23
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama tahun 2021 .....	25
Tabel 2.4 Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Tahun 2021 .....	27

Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja.....	37
Tabel 3.1	Nilai Capaian Kinerja dan Interpretasinya.....	40
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2021.....	42
Tabel 3.3	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dinas Kabupaten Paser 2021 .....	44
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Sasaran 1 .....	46
Tabel 3.5	Analisis Pencapaian Sasaran 2 .....	47
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasaran 3 .....	48
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran 4 .....	49
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran 5 .....	49
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran 6 .....	50
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran 7 .....	51
Tabel 3.11	Analisis Pencapaian Sasaran 8 .....	52
Tabel 3.12	Analisis Pencapaian Sasaran 9 .....	52
Tabel 3.13	Analisis Pencapaian Sasaran 10 .....	53
Tabel 3.14	Analisis Pencapaian Sasaran 11 .....	53
Tabel 3.15	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	54
Tabel 3.16	Rincian Anggaran Belanja Dinas Kesehatan	56
Tabel 3.17	Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan sasaran, program dan kegiatan tahun 2021.....	56
Tabel 3.18	Pencapaian Realisasi Anggaran vs Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2021 .....	59
Tabel 3.19	Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan .....	63

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2016-2021. LKjIP juga sebagai alat kendali dan menilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan menuju terwujudnya **good government** yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2021 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Bupati Paser seperti yang tertuang dalam RPJMD, Dinas Kesehatan Kabupaten Paser menetapkan 6 (enam) tujuan dan sasaran strategis, dengan indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

**Tabel 1.0 Rincian Indikator Capaian Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	%
1	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Unit Layanan	100	97,6	97,6%
2	Menurunkan jumlah kematian ibu matdernal	Jumlah kematian ibu	5	20	25%
		Presentase cakupan pelayanan nifas (KF)	95	108,6	114,3%
3	Menurunkan jumlah kematian neonatal, bayi dan balita	Angka kematian neonatus per 1000 kelahiran hidup	8	10,1	73,8%
		Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	7	11	42,9%
		Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	10	11,7	83,0%
4	Meningkatnya status gizi pada masyarakat khususnya balita	Menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan buruk (persen)	7%	7,8%	89%
5	Peningkatan kualitas manajemen dan mutu pelayanan kesehatan	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu,pusban per 1000 penduduk	1	0,64	64,0%
		Presentase ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di desa	100	98	98,0%
		Puskesmas terakreditasi madya	0	15	100,0%
6	Meningkatkan kecukupan SDM kesehatan disetiap jenjang pelayanan	Rasio dokter, dokter gigi per 100000 penduduk	50	30,88	61,8%
		Presentase puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100	75	75,0%
7	Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular	Persentase desa UCI	95	66	69,5%
		Menurunnya prevalensi kasus TBC	224 per 100.000 pddk	135 per 100.000 pddk	165,9%
		Jumlah penemuan kasus pneumonia pada balita	15	57	100,0%
		Jumlah desa melaksanakan STBM	80	72	90,0%
		Jumlah Kasus KLB	0	0	100,0%



8	Meningkatnya pelayanan kesehatan usila	Usia harapan hidup	75,5	72,88	96,5%
9	Meningkatnya kesadaran masy untuk hidup bersih dan sehat	Presentase keluarga sehat	80	63,22	79,0%
		Presentase desa sehat	80	72	90,0%
		Presentase desa siaga	95	85	89,5%
10	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program	Capaian program dan kegiatan sesuai dengan sasaran	95	80	84,2%
11	Meningkatkan sarana prasarana, disiplin dan sumber daya aparatur guna pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik.	Presentase sarana dan prasarana kesehatan	100	55	55,0%
		Presentase capaian penilaian review terhadap akuntabilitas dan kinerja OPD	>95	-	-

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Paser sebagai wujud Pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan, serta dalam rangka mewujudkan **Good Government**, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, sebagai langkah awal terlebih dahulu menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Paser 2016-2021.

Pencapaian kinerja suatu unit Organisasi dapat diukur secara sistematis dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu suatu sistem laporan untuk pertanggungjawaban kepada pejabat dan publik atas kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dipandang perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **1. Kedudukan**

Peraturan Bupati Paser Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, Dinas Kesehatan Kabupaten Paser merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Paser Dinas Kesehatan, sangat vital sekali yaitu sebagai *stakeholders* dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan masyarakat sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Paser.

### **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Kesehatan Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah dengan rincian tugas fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser. Dinas Kesehatan Kabupaten Paser mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di daerah dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan, dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas perbantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Paser menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta

sumber daya kesehatan sesuai dengan renstra pemerintah daerah.

- b. Penetapan kebijakan dibidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan yang meliputi upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaam kesehatan masyarakat, manajemen kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- e. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan ;

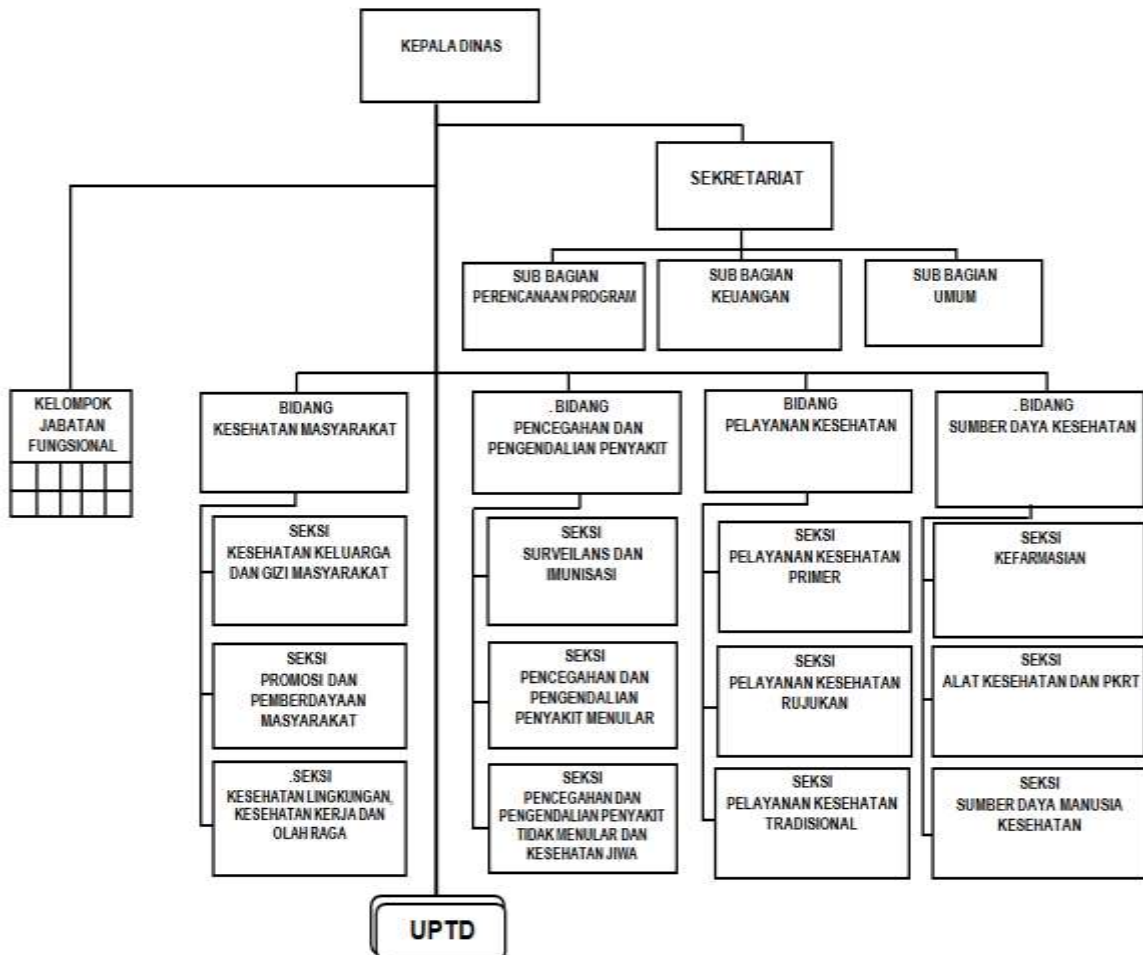
Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Paser sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai PERDA Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Kepala Dinas dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretariat membawahi Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Keuangan;
2. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi Seksi Surveilans dan Imunisasi, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi seksi Kefarmasian, Seksi Alat Kesehatan dan PKRT, dan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## B. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2020.

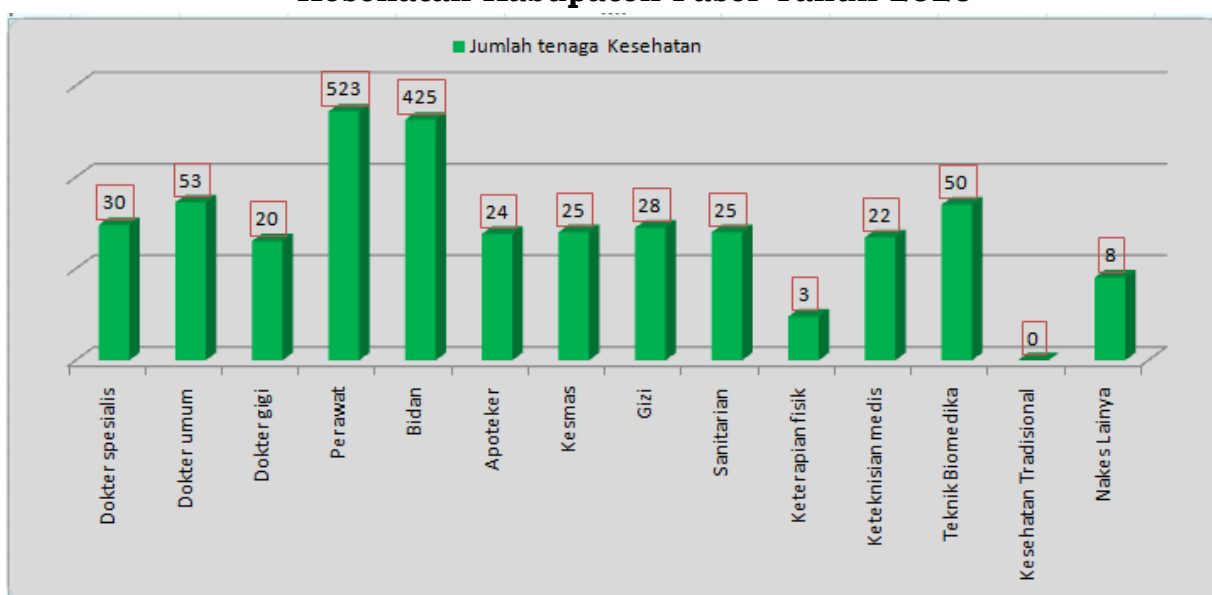


Sumber : Data Subbag Kepegawaian dan Umum Tahun 2020  
(Berdasarkan Perbub Nomor 7 Tahun 2020)

#### D. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia Kesehatan dikelompokkan menjadi beberapa rumpun dan subrumpun. Rumpun tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 11 adalah tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain. Berikut disajikan pengelompokan rumpun dan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Paser Tahun 2020 sebagai berikut :

**Gambar 1.2 Pengelompokan rumpun dan jumlah tenaga kesehatan dalam wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2020**



Sumber : Bidang SDK 2020

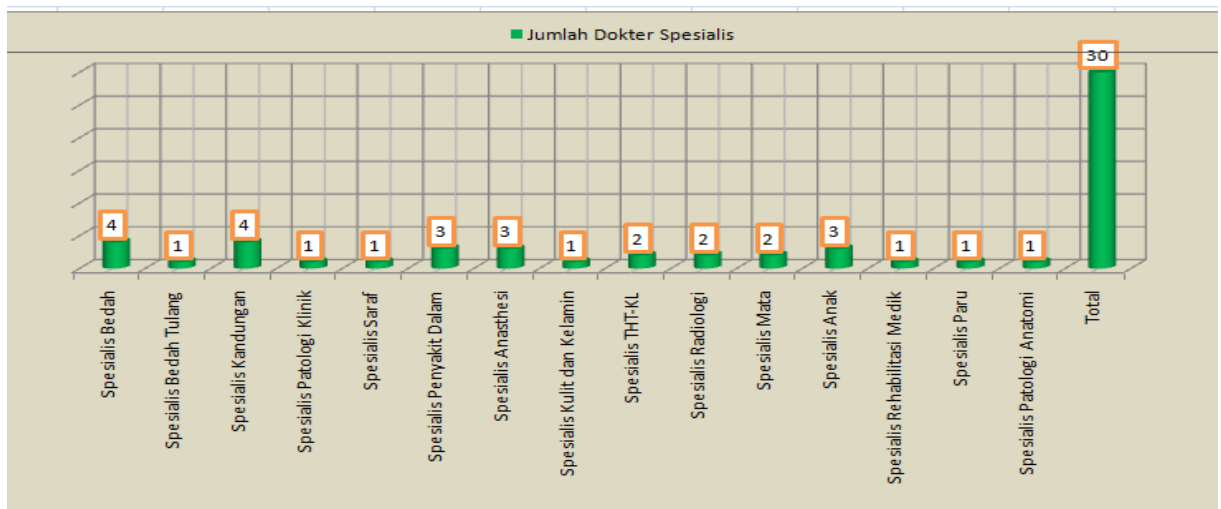
Menurut data tersebut diatas Jumlah perawat dan bidan mendominasi jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Paser 75 persen.

## 1. Dokter Spesialis

Pelayanan spesialis yang ada di rumah sakit di antaranya pelayanan spesialis dasar, spesialis penunjang, spesialis lain, subspecialis, dan spesialis gigi dan mulut. Pelayanan spesialis dasar meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi. Pelayanan spesialis penunjang meliputi pelayanan anestesiologi, radiologi, patologi klinik, patologi anatomi, dan rehabilitasi medik. Pelayanan spesialis lain meliputi pelayanan mata, telinga hidung tenggorokan, syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi, urologi, bedah syaraf, bedah plastik, dan kedokteran forensik.

Saat ini dokter spesialis hanya ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panglima Sebaya Kabupaten Paser yang berjumlah 30 orang dokter (data per januari 2021) diantaranya dokter spesialis anak, kandungan, bedah, bedah tulang, penyakit dalam, penyakit paru, anestesiologi, orthopedic. rehabilitasi medic, radiologi, mata, telinga hidung tenggorokan, syaraf, kulit dan kelamin, patologi klinik dan patologi anatomi. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut :

**Gambar 1.3 Jumlah dokter spesialis di RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser Tahun 2020**



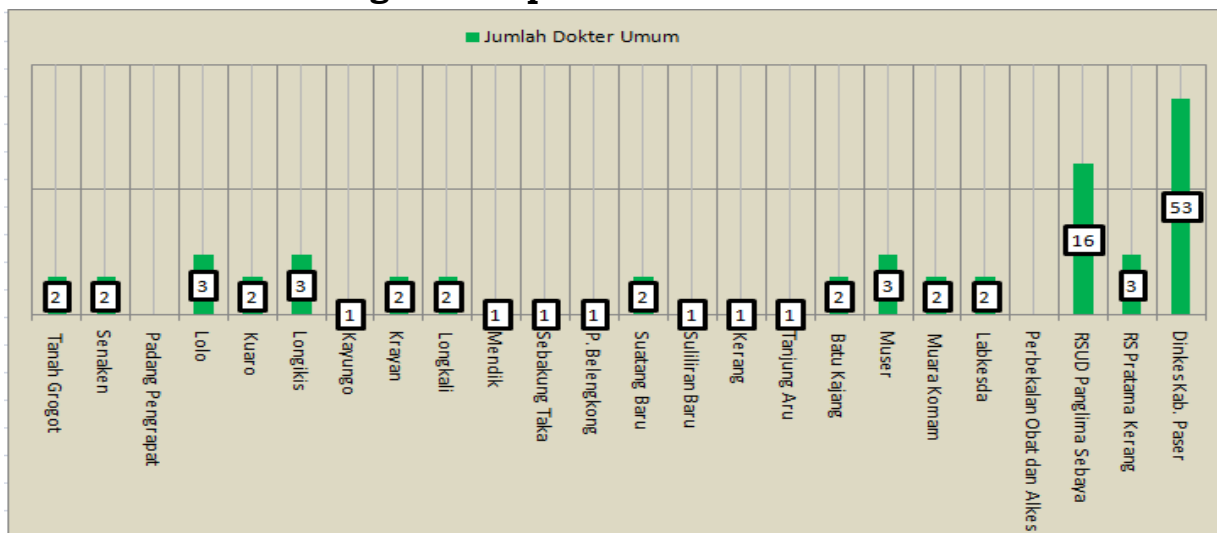
Sumber : RSUD Panglima Sebaya 2020

## 2. Tenaga Dokter Umum

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 juga mengatur kecukupan tenaga kesehatan di Puskesmas Pada Puskesmas non rawat inap, minimal jumlah dokter adalah satu orang, sedangkan pada Puskesmas rawat inap minimal jumlah dokter dua orang, baik pada wilayah perkotaan, perdesaan, maupun kawasan terpencil dan sangat terpencil. Pada tahun 2018, secara nasional terdapat 39,16 persen Puskesmas yang memiliki dokter melebihi jumlah standar yang ditetapkan, 35,7 persen Puskesmas sudah cukup dokter, dan 25,14 persen Puskesmas kekurangan dokter.

Data Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser jumlah dokter umum disemua fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Paser berjumlah 53 orang. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut :

**Gambar 1.4 Jumlah dokter umum menurut puskesmas, labkesda, RSUD Panglima Sebaya, RS Pratama Kerang di Kabupaten Paser Tahun 2020**



Sumber : Bidang SDK 2020

Data diatas memperlihatkan masih ada puskesmas yang belum memiliki tenaga dokter umum yaitu Puskesmas Padang Pengrapat, sedangkan rata-rata kecukupan dokter umum di puskesmas menurut Permenkes Nomor 43 tahun 2019 di



Kabupaten Paser cukup memadai. Saat ini rasio tenaga dokter umum di Kabupaten Paser adalah 13.0 per 100.000 penduduk

### 3. Tenaga Dokter Gigi

Jumlah dokter gigi di Puskesmas minimal satu orang, baik di Puskesmas rawat inap dan non rawat inap dan di wilayah perkotaan, perdesaan, maupun di kawasan terpencil dan sangat terpencil. di Indonesia pada tahun 2018, terdapat 11,8 persen Puskesmas melebihi jumlah standar dokter gigi, 45,4 persen Puskesmas dengan jumlah dokter gigi cukup, dan 42,8 persen Puskesmas kekurangan dokter gigi.

Data Bidang Sumber Daya Kesehatan Tahun 2019 jumlah dokter gigi di fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Paser ber jumlah 20 orang dokter gigi. Adapaun rincian dokter gigi menurut Puskesmas dan RS di sajikan pada gambar berikut :

**Gambar 1.5 Jumlah dokter gigi menurut puskesmas, labkesda, RS di Kabupaten Paser Tahun 2020**



Sumber : Bidang SDK 2020

Berdasarkan gambar 5.2 diatas menunjukkan masih ada 4 (empat) puskesmas yang belum memiliki dokter gigi yaitu Longkali, Pasir Belengkong, Tanjung Aru, Muser. Saat ini rasio

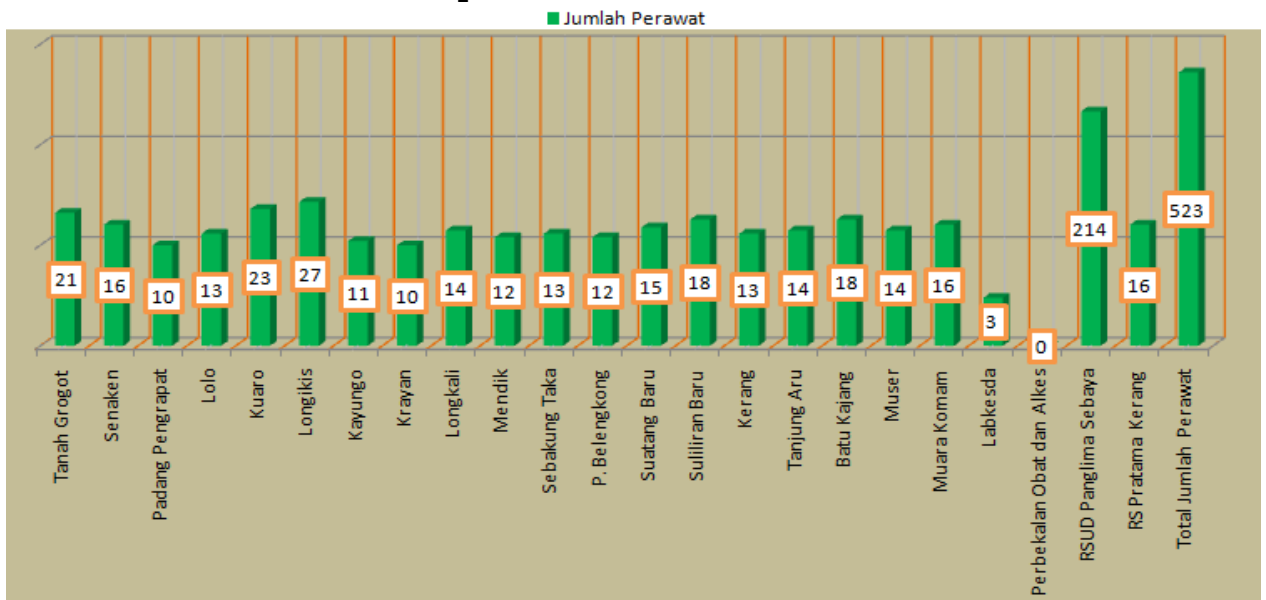
tenaga dokter gigi di Kabupaten Paser adalah 6.0 per 100.000 penduduk.

#### 4. Tenaga Perawat

Perawat pada Puskesmas non rawat inap minimal berjumlah lima orang sedangkan pada Puskesmas rawat inap minimal berjumlah delapan orang. Kondisi ini merupakan standar minimal di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil. Di Indonesia pada tahun 2018, terdapat 72,5 persen Puskesmas memiliki jumlah perawat lebih dari standar yang ditetapkan, 7,2 persen. Puskesmas dengan jumlah perawat cukup, dan 20,3 persen Puskesmas kekurangan perawat.

Data Bidang Sumber Daya Kesehatan Tahun 2020 jumlah Puskesmas dan RS dengan perawat cukup dan lebih selengkapnya di sajikan pada gambar berikut :

**Gambar 1.6 Jumlah perawat menurut puskesmas, labkesda, RS di Kabupaten Paser Tahun 2020**



Sumber : Bidang SDK 2020

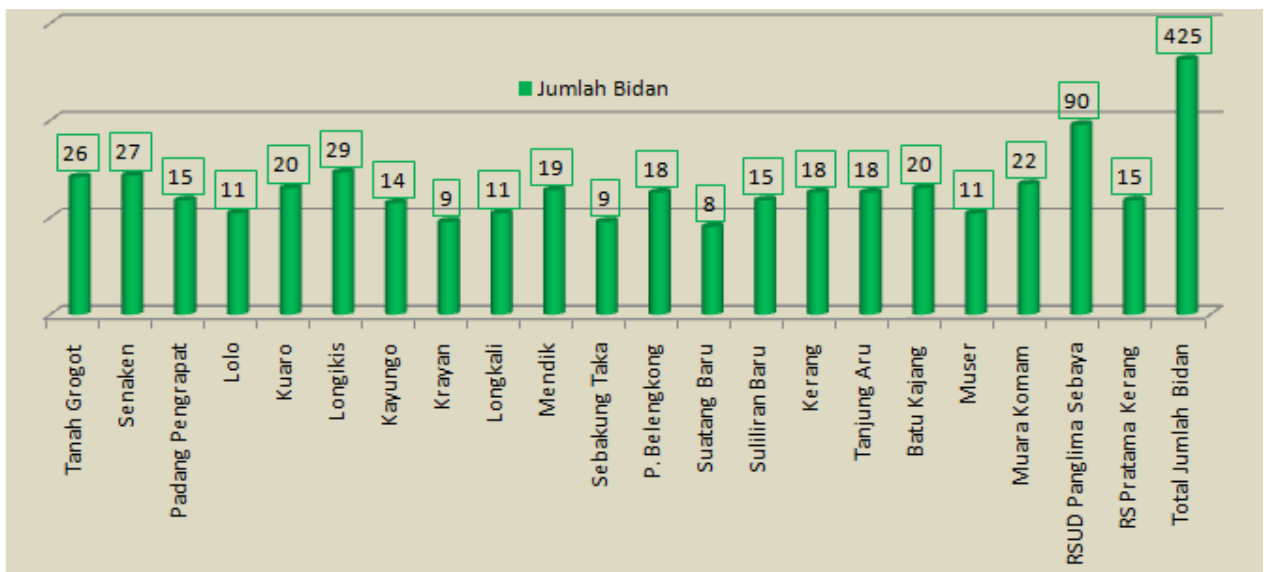
Rata-rata kecukupan tenaga perawat yang bekerja di puskesmas, telah memenuhi standart kecukupan tenaga menurut Permenkes Nomor 43 Tahun 2019. Saat ini di

Kabupaten Paser Rasio tenaga perawat adalah 184 per 100.000 penduduk

### 5. Tenaga Bidan

Jumlah bidan di Puskesmas non rawat inap minimal empat orang dan di Puskesmas rawat inap minimal tujuh orang. Kondisi ini merupakan standar minimal di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil. Pada tahun 2018, secara nasional terdapat 81,9 persen Puskesmas memiliki bidan melebihi jumlah standar yang ditetapkan, 4,23 persen Puskesmas sudah cukup bidan, dan 13,9 persen Puskesmas kekurangan bidan, selengkapnya jumlah tenaga bidan di Kabupaten Paser disajikan pada gambar berikut :

**Gambar 1.7 Jumlah bidan menurut puskesmas, labkesda, RS di Kabupaten Paser Tahun 2020**



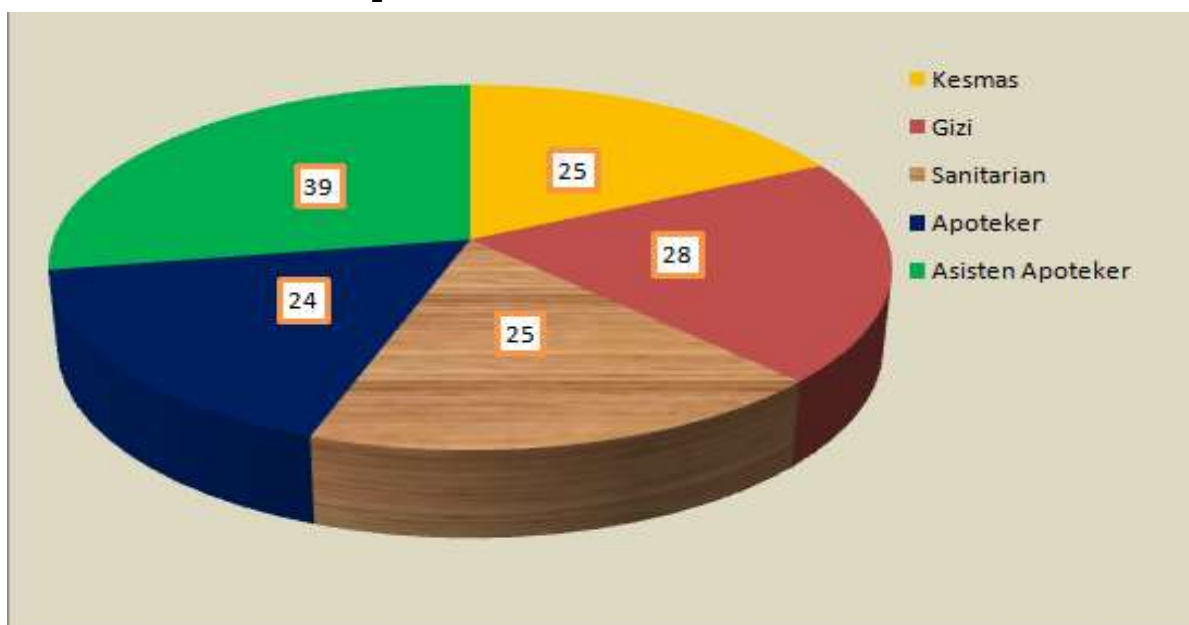
Sumber : Bidang SDK 2020

Data tersebut menunjukkan kecukupan tenaga bidan di puskesmas telah memenuhi standart Permenkes Nomor 43 Tahun 2019. Saat ini di Kabupaten Paser Rasio tenaga bidan adalah 150 per 100.000 penduduk.

## 6. Tenaga Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Gizi, dan Sanitarian,

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, bahwa tenaga kesehatan di Puskesmas tidak hanya tenaga medis tetapi juga tenaga promotif dan preventif untuk mendukung tugas Puskesmas dalam melaksanakan upaya kesehatan masyarakat. Dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019, salah satu indikator dalam meningkatkan ketersediaan dan mutu SDMK sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yaitu jumlah Puskesmas yang memiliki lima jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, dan analis kesehatan. Selengkapnya jumlah tenaga promotif dan preventif di Kabupaten Paser di sajikan pada gambar berikut :

**Gambar 1.8 Jumlah tenaga promotif dan preventif menurut puskesmas, labkesda, perbekalan obat dan alkes di Kabupaten Paser Tahun 2020**



Sumber : Bidang SDK 2020

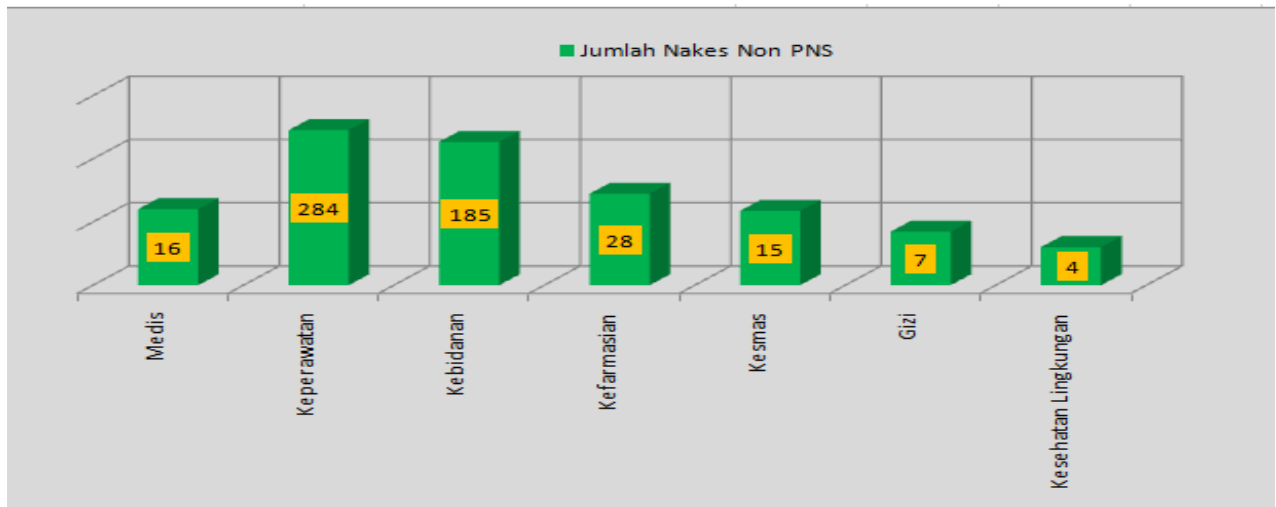
## **7. Tenaga Kesehatan dengan Status Pegawai Tidak Tetap (PTT)**

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan tenaga kesehatan sebagai pegawai Tidak Tetap, PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

Pengangkatan dan penempatan dokter dan bidan sebagai PTT dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada pemerintah pusat dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan, sedangkan pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota.

Data bidang sumber daya kesehatan dinas kesehatan Kabupaten Paser menunjukkan saat ini jumlah tenaga kesehatan Non PNS berjumlah 844 orang dari berbagai disiplin ilmu kesehatan. Selengkapnya jumlah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang disajikan pada gambar berikut :

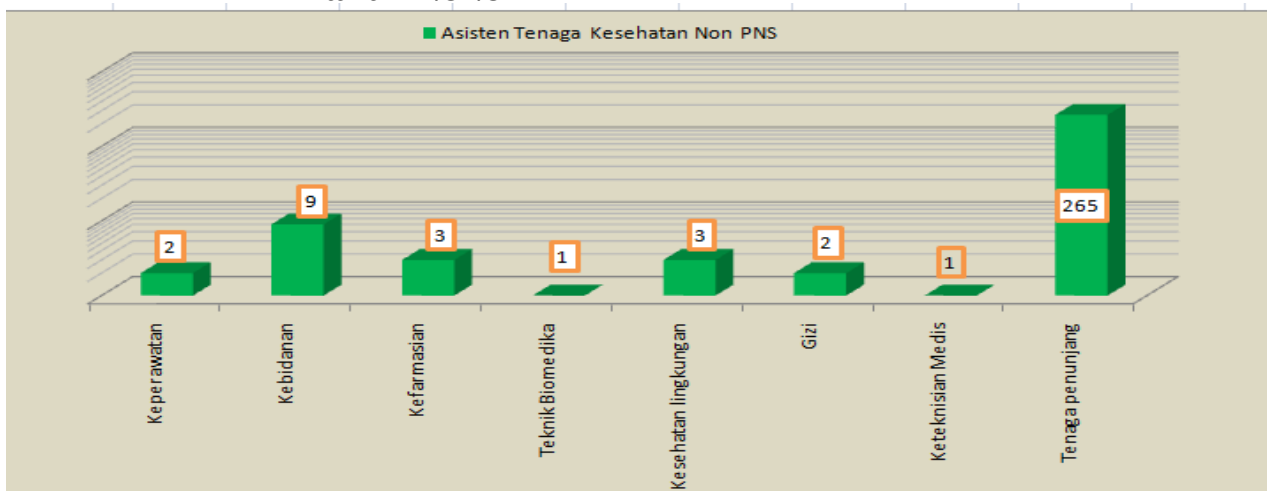
**Gambar 1.9 Jumlah tenaga kesehatan non PNS (PTT) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2020**



Sumber : Bidang SDK 2020

Data diatas menunjukkan tenaga keperawatan dan kebidanan non PNS masih mendominasi dari semua jenis tenaga kesehatan di Kabupaten Paser, sedangkan jumlah asisten tenaga kesehatan non PNS, tenaga keperawatan dan kebidanan merupakan jenis asisten tenaga kesehatan yang tertinggi jumlahnya di bandingkan dengan jenis asisten tenaga kesehatan lainnya. Selengkapnya disajikan seperti pada gambar berikut :

**Gambar 1.10 Jumlah asisten tenaga kesehatan non PNS (PTT) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2020**



Sumber : Bidang SDK 2020

## E. SARANA DAN PRASARANA

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, sarana dan prasarana yang dimiliki SKPD Dinas Kesehatan adalah : 19 Unit Puskesmas yang terdiri 10 Unit Puskesmas Rawat Inap dan 9 Unit Puskesmas Non Rawat Inap yang tersebar di 10 Kecamatan, serta 2 UPTD Penunjang yang berada di ibu kota Kabupaten. Klinik kesehatan yang terdata sejumlah 29 klinik dan RSUD sebanyak 2 Unit (1 unit proses ijin operasional), sarana pendukung lainnya antara lain Kendaraan Operasional Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) baik di Dinas maupun di UPTD, Pukesmas keliling/ ambulance sebanyak 24 Unit dan Pusling Air sebanyak 1 Unit. Selain itu untuk menjangkau pelayanan kesehatan sampai tingkat desa telah dibangun Pusban/Poskesdes/Polindes yang berjumlah 137 buah, namun masih ada sarana tersebut belum terisi petugas (bidan /perawat) fasilitas lainnya untuk petugas desa telah dialokasikan kendaraan roda 2 (dua) untuk Perawat dan Bidan yang bertugas di Desa sejumlah 212 kendaraan roda dua.

**Tabel 1.11 Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Kesehatan Tahun 2020**

Nama Unit Layanan	Kondisi Pusling Roda 4/ mobil Dinas	Gedung Kantor	Jumlah Rumah Dinas dr/drg	Jumlah Rumah Dinas Paramedis	Komputer (Unit)	Pustu (Unit)	Poskesdes (unit)	Alat Kesehatan (unit)	Kendaraan Roda Dua
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dinas Kesehatan	8	1	1	2	6	-	-		18
RS Pratama Kerang	1	1	2	2	4	-	-		1
UPTD Labkesda	1	1	-	-	2	-	-		2
UPTD GFK	3	2	-	-	2	-	-		-
Tanah Grogot	3	1	1	-	2	11	-		-
Pd.Pengrapat	3	1	1	1	3	2	-		9
Ps. Belengkong	3	1	2	3	3	4	1		8
Suliliran Baru	4	1	2	1	3	5	-		-
Suatang Baru	3	1	1	1	3	3	2		6
Lolo	3	1	2	4	3	2	-		10
Kerang	3	1	2	7	3	8	-		18

Tanjung Aru	3	1	2	6	3	6	-		12
Batu Kajang	4	1	2	4	3	7	-		17
Muara Komam	3	1	2	5	3	9	2		34
Muser	3	1	1	7	3	3	4		21
Kuaro	4	1	2	3	3	8	2		16
Longikis	4	1	1	4	3	9	3		23
Krayan	3	1	1	3	3	4	1		-
Kayungo	3	1		2	3	5	3		18
Longkali	3	1	1	2	3	6	2		21
Mendik	3	1	2	2	3	8	1		-
Sebakung	1	1	1	1	2				
<b>Kabupaten</b>	<b>64</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>58</b>	<b>64</b>	<b>108</b>	<b>21</b>		<b>232</b>

Sumber : Data Subbag Kepegawaian dan Umum dan seksi SDK Tahun 2021

#### **F. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN**

Secara umum pelaksanaan pemerintahan urusan kesehatan di kabupaten paser sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa permasalahan dan hambatan yang perlu ditindak lanjuti di tahun mendatang diantaranya:

1. Distribusi Tenaga Kesehatan di setiap Puskesmas sampai dengan Puskesmas Pembantu masih belum merata yang disebabkan banyak faktor
2. Pemenuhan Tenaga Dokter , dokter Gigi di puskesmas serta dokter spesialis di Rumah sakit pratama
3. Kondisi Ambulance dan Pusling roda 4 dan 2 di beberapa Puskesmas sudah mulai rusak sehingga perlu dilakukan perbaikan dan pengantian unit
4. Beberapa puskesmas perlu dilakukan pembenahan untuk menyesuaikan standar permenkes 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
5. Pemenuhan pelayanan standar Pelayanan Minimal berupa tenaga pelayanan dan bahan medis habis pakai
6. Kondisi Pandemi Covid-19 masih menjadi permasalahan utama guna pencapaian cakupan pelayanan kesehatan di masyarakat.



## **G. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menginformasikan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser selama tahun 2021. Capaian kinerja (performance results) tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Paser 2021 akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang, agar mempermudah memahami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser diperlukan suatu penyajian yang berurutan dan tersistem, untuk itu Tim Penyusun pada subbag perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser membuat sistematika penyajian yang sudah sesuai standar pelaporan sebagai berikut :

### **KATA PENGANTAR**

Bagian yang ditanda tangani oleh penanggung jawab organisasi dan berisi hal-hal penting yang ingin disampaikan mengenai akuntabilitas kinerja organisasi yang bersangkutan

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Menyajikan secara ringkas tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja berdasarkan pengukuran dan analisis pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Tahun 2021.

### **BAB. I PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, kedudukan, tugas fungsi dan kewenangan, struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana ,permasalahan dan hambatan, sistimatika penyajian.

## **BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2021 meliputi RPJMD 2016-2021, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021

## **BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021**

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis dan realisasi kinerja Tahun 2021.

## **BAB. IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser tahun 2016-2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Paser. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Paser 2016-2021 menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) program dan kegiatan yang sesuai dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Paser. Rencana strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

##### 1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Paser

Visi “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Paser Yang Sehat, Mandiri dan Berkeadilan “

**Sehat** diartikan sebagai manifestasi dari pengertian kesehatan yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 sebagai visi nasional sekaligus juga sebagai sebagai upaya untuk selalu berusaha mewujudkan keadaan sehat fisik-jasmani, mental-spiritual serta sosial yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis

**Mandiri** diartikan adanya kesadaran, kemampuan dan kemauan masyarakat untuk hidup sehat.

**Berkeadilan** diartikan bahwa diperlukan keadilan dalam pelayanan kesehatan tanpa membedakan agama, jenis kelamin, suku, ras, golongan, status sosial, wilayah dan kemampuan yang

berbeda, baik dari aspek akses, partisipasi, pengawasan maupun manfaat.

Untuk mewujudkan visi Dinas Kesehatan 2016-2021 diatas, maka disusunlah **Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Paser** sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
- b. Menyediakan sarana kesehatan dan kefarmasian sesuai dengan kebutuhan
- c. Mengendalikan masalah kesehatan berdasarkan pola perkembangan penyakit dan masalah kesehatan.
- d. Meningkatkan Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.
- e. Menyelenggarakan tata kelola administrasi dan manajemen pemerintahan yang baik.

## **2. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Paser**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2018 sebanyak 11 (sebelas) sasaran strategis yang dijabarkan sesuai dengan visi dan misi bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabuapten Paser Tahun 2016-2021 dimana urusan kesehatan terdapat pada misi ke-2, tujuan ke-2 dan sasaran ke-2 seperti dijelaskan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Linearitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Paser dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2021**

Visi	<b>Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera</b>								
Misi 4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.								
Sasaran	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Paser (RPJMD Kabupaten Paser )								
Tujuan Dinas Kesehatan	Sasaran Dinas Kesehatan	Indikator Sasaran	Satuan (%)	Target					
				2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan akses dan kualitas yankes pada masyarakat	Meningkatnya Pelayanan khususnya bagi Kesehatan penduduk miskin	Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan	%	88	89	93	91	100	
Meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak	Menurunnya jumlah kematian ibu maternal	Jumlah kematian ibu	%	8	7	6	5	4	
		Presentase cakupan pelayanan nifas (KF)	%	73,4	75	80	90	95	
	Menurunkan jumlah kematian neonatal, bayi dan balita	Angka kematian neonatus per 1000 kelahiran hidup	%	10,6	10	9,5	9	8	
		Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	%	14,4	13	12	11	10	
		Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	%	14	13	12	11	10	
Meningkatnya status gizi pada masyarakat khususnya balita	Prevalensi balita gizi kurang dan buruk (persen)	%	11%	10%	9%	8%	7%		
Meningkatkan kualitas sarana,	Peningkatan kualitas manajemen dan mutu	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu,pusban per 1000		0,47	0,6	0,8	0,9	1	

prasarana serta tata kelola layanan kesehatan	pelayanan kesehatan	penduduk						
		Presentase keterdiaan sarana pelayanan kesehatan di desa	%	91	93	96	99	100
		Puskesmas terakreditasi madya	%	2	1	1	1	0
	Meningkatkan kecukupan SDM kesehatan disetiap jenjang pelayanan	Rasio dokter, dokter gigi per 100000 penduduk	%	20	25	35	45	50
Presentase puskesmas memiliki tenaga kesehatah sesuai standar		%	25	55	75	95	100	
Meningkatkan program pengendalian masalah kesehatan	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular	Persentase desa UCI	%	74	80	84	92	95
		Menurunnya prevalensi kasus TBC	%	235 per 100.00 pddk	230 per 100.00 pddk	228 per 100.00 pddk	226 per 100.00 pddk	224 per 100.00 pddk
		Jumlah penemuan kasus pneumonia pada balita	%	31	29	22	18	15
		Jumlah desa melaksanakan STBM	%	41	50	60	70	80
		Jumlah Kasus KLB	%	2	1	1	1	0
	Meningkatnya pelayanan kesehatan usila	Usia harapan hidup	%	74,4	74,6	74,8	75	75,5
Mewujudkan lingkungan sehat dimasyarakat	Meningkatnya kesadaran masy. untuk hidup bersih dan sehat	Presentase keluarga sehat	%	20	20	40	60	80
		Presentase desa sehat	%	64	68	72	75	80
		Presentase desa siaga	%	80,5	82	85	90	95

Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program	Capaian program dan kegiatan sesuai dengan sasaran	%	86	89	92	94	95
	Meningkatkan sarana prasarana, disiplin dan sumber daya aparatur guna pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik.	Presentase sarana dan prasarana kesehatan	%	70	75	80	90	100
		Presentase capaian penilaian review terhadap akuntabilitas dan kinerja OPD	%	85	87	90	92	95

Sumber : Renstra dan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2016-2021

### 3. Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Paser**

Strategi	Arah Kebijakan
1. Tersedianya anggaran jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan	1. Penyediaan anggaran jaminan kesehatan menuju total coverage BPJS untuk masyarakat Kabupaten Paser
1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan keluarga dengan pendataan seluruh ibu hamil, bersalin dan nifas dengan melibatkan lintas sektor 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan bayi, balita sesuai standart 3. Meningkatkan pelayanan pada kelompok sasaran 1000 hari pertama kehidupan 4. Meningkatkan pendidikan gizi dan pemberdayaan masyarakat 5. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan gizi 6. Meningkatkan cakupan pelayanan lansia	1. Semua ibu hamil harus mendapatkan pelayanan ANC terpadu 2. Semua neonatus, bayi dan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 3. Intervensi pelayanan gizi fokus pada 1000 hari pertama kehidupan 4. Seluruh bayi dan balita harus ditimbang setiap bulan 5. Pelaksanaan sistem evaluasi pencatatan dan pelaporan di Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; dan 6. Menjamin akses pelayanan kesehatan pada fasyankes
1. Seluruh Puskesmas diharapkan terakreditasi 2. Memenuhi jumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sehingga akses pelayanan mudah dan terjangkau 3. Pengembangan kapasitas puskesmas menjadi puskesmas	1. Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan akreditasi Puskesmas 2. Menyediakan sarana dan prasarana yang layak, memadai dan standar 3. Meningkatkan jumlah puskesmas rawat inap dan layanan UGD 24 jam 4. Memenuhi obat dan alat bahan kedokteran habis pakai pada Sarana



<p>rawat inap dan mampu menyediakan pelayanan 24 jam</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menjamin ketersediaan buffer stock obat dan perbekalan kesehatan dan penanggulangan bencana</li> <li>5. Melakukan pengawasan terhadap fasilitas dan penggunaan bahan kefarmasian</li> <li>6. Memenuhi ketersediaan SDM kesehatan di fasilitasi pelayanan kesehatan</li> <li>7. Meningkatkan kualitas SDM Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan kesehatan dan uji kompetensi</li> </ol>	<p>Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pelaksanaan penertiban rekomendasi izin apotek, toko obat dan usaha mikro, obat tradisional;</li> <li>6. Pengangkatan tenaga medis dan paramedis Daerah melalui seleksi sesuai kompetensi dan standar mutu serta pendistribusian tenaga kesehatan secara merata di setiap Fasyankes</li> <li>7. Meningkatkan pelaksanaan kemitraan dan pendidikan pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular dan wabah sejak dini dengan penguatan sistem surveillance dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya penyehatan lingkungan</li> <li>2. Meningkatkan cakupan pelayanan lansia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat</li> <li>2. Menjamin akses pelayanan kesehatan lansia pada fasyankes</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang PHBS</li> <li>2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dalam Pembangunan Kesehatan dengan pendekatan keluarga sehat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan sarana dan prasarana promosi kesehatan, dan peningkatan kapasitas tenaga promosi kesehatan</li> <li>2. Mendorong peran serta aktif masyarakat desa dalam program desa siaga aktif serta peran aktif Organisasi masyarakat dan Badan Usaha dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan dan pencapaian program</li> <li>2. Meningkatkan mutu manajemen dan administrasi</li> <li>3. Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai</li> <li>4. Meningkatkan kompetensi SDM Kesehatan sesuai standart</li> <li>5. Membangun sistem informasi kesehatan terpadu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intervensi terhadap pelaksanaan program</li> <li>2. Proses administrasi dan manajemen dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku</li> <li>3. Semua unit pelayanan memiliki ruang dengan prasarana yang cukup</li> <li>4. Semua Puskesmas Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar</li> <li>5. Pencatatan dan pelaporan data dan informasi kesehatan terintegrasi</li> </ol>

dalam jaringan komputer

Sumber : Renstra 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Unit Layanan
2	Menurunkan jumlah kematian ibu maternal	Jumlah kematian ibu Presentase cakupan pelayanan nifas (KF)
3	Meurunkan jumlah kematian neonatal, bayi dan balita	Angka kematian neonatus per 1000 kelahiran hidup Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Angka kematian balita per 1000 lahiran hidup
4	Meningkatnya status gizi pada masyarakat khususnya balita	Prevalensi balita gizi kurang dan buruk (persen)
5	Peningkatan kualitas manajemen dan mutu pelayanan kesehatan	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu, pusban per 1000 penduduk Presentase keterdiaan sarana pelayanan kesehatan di desa Puskesmas terakreditasi madya
6	Meningkatkan kecukupan SDM kesehatan disetiap jenjang pelayanan	Rasio dokter, dokter gigi per 100000 penduduk Presentase puskesmas memiliki tenaga kesehatah sesuai standar
7	Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular	Persentase desa UCI Menurunnya prevalensi kasus TBC Jumlah penemuan kasus pneumonia pada balita Jumlah desa melaksanakan STBM Jumlah Kasus KLB

8	Meningkatnya pelayanan kesehatan usila	Usia harapan hidup
9	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	Presentase keluarga sehat
		Presentase desa sehat
		Presentase desa sehat
10	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program	Capaian program dan kegiatan sesuai dengan sasaran
11	Meningkatkan sarana prasarana, disiplin dan sumber daya aparatur guna pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik.	Presentase sarana dan prasarana kesehatan
		Presentase capaian penilaian review terhadap akuntabilitas dan kinerja OPD

Sumber : Renja Dinkes Paser Tahun 2021

## **B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)**

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dalam organisasi Pemerintah daerah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Bupati Paser nomor 7 tahun 2020 disebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Paser mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas perbantuan.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 yang telah disusun, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Paser telah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.4 Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Tahun 2021**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )
A	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Cakupan layanan UKM dan UKP</b>
I	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia</b>
1	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhabilitasi dan terpelihara
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang terpelihara
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Persentase Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Rehab
5	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana di Puskesmas
6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana di Puskesmas
7	Pengadaan Obat, Vaksin	.Persentase ketersediaan obat dan bahan pakai habis di fasyankes
8	Pengadaan Bahan Habis Pakai	.Persentase ketersediaan obat dan bahan pakai habis di fasyankes
9	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana faskes lainnya yang dipelihara
10	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang Memiliki Sarana Prasarana di Perbaiki dan di Kalibrasi

II	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan</b>
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1)Persalinan di Fasilitas kesehatan (persen))
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1).Cakupan Kunjungan Bayi
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1)Presentase Puskesmas yang Melaksanakan Kelas Ibu Balita
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PersentasPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1).Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Usila
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	5).Prevalensi Hipertensi (kasus)
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4).Cakupan Pelayanan Diabetes Miius (DM)
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus TB
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Operasionalisasi Klinik VCT HIV/AIDS di Puskesmas
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1).Persentase Penanganan Kasus KLB
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Presentase stunting
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK yang terbentuk

16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	<b>1).Persentase Desa ODF (open defacation free)</b>
17	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1).Persentase Ketersediaan Media Promosi dan Informasi Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1).Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional dalam gedung dan luar gedung
19	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Penanganan Kasus KLB
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase pemenuhan layanan kesehatan ODMK
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase pemenuhan layanan kesja dan NAPZA
22	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase pemenuhan layanan skrining dan vaksinasi pada calhaj
23	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pemenuhan layanan penyakit menular dan penyakit tidak menular
24	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan masyarakat
25	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang diperiksa
26	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen yang dikirim
27	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah tatanan sehat yang difasilitasi
28	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan layanan RS
29	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase tersedianya anggaran operasional pelayanan kesehatan
30	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan layanan Faskes lainnya
31	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dilaksanakan Pendampingan dan Terakreditasi

32	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah awal kejadian (KIPI) yang diinvestigasi
33	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah layanan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah yang dilaksanakan
<b>III</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi</b>
1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen data dan informasi kesehatan
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah sistem informasi kesehatan yang dikelola
3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah peralatan sistem informasi kesehatan
<b>IV</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penerbitan Izin RS kelas C dan D dan fasyankes</b>
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Laporan Pengendalian dan pengawasan
2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Laporan manajemen mutu pelayanan RS/PKM
3	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	jumlah dokumen
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase SDM Kesehatan yang sesuai kompetensinya</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kuantitas SDM Kesehatan Sesuai Standa</b>

1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1).Persentase Kecukupan Tenaga Kesehatan di Desa
2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1).Persentase Kecukupan Tenaga Kesehatan di Desa
3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan terlayani
<b>II</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase SDM yang mendapatkan peningkatan mutu dan kompetensi</b>
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1).Jumlah Dokter Dan Paramedis Yang Dilakukan Update Kapasitas Dalam Pelayanan
<b>C</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Persentase obat, alkes &amp; makanan minuman di peredaran yang memenuhi syarat</b>
<b>I</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>Persentase pengajuan izin rekomendasi Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang ditindaklanjuti</b>
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen dan laporan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, alkes dan UMOT
2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen data perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diawasi



II	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>Persentase pengajuan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi yang ditindaklanjuti</b>
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan pengawasan sertifikat produksi alkes dan PKRT
III	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>Persentase penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi TPM</b>
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan dan penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi TPM (jasa boga, rumah makan dan DAM)
IV	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>Persentase penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan</b>
1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah dokumen dan laporan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan makanan jajanan
V	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>Persentase hasil pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang ditindaklanjuti</b>

1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah post market dan produk makanan dan minuman industri rumah tangga yang diperiksa
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>		
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) aktif</b>
<b>I</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kec yang mendapatkan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor</b>
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapatkan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
<b>I</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Keluarga yang mempraktikkan PHBS</b>
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1).Cakupan Persentase Rumah Tangga ber-PHBS
<b>I</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentse UKBM yang dikembangkan</b>
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Presentase posyandu aktif
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai saki</b>

<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1)Jumlah lDokumen Renja SKPD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang dilakukan sinkronisasi
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	.Jumlah Dokumen Evaluasi Renja SKPD
<b>I</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase dokumen dan laporan adminitrasi keuangan yang tersusun</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD
<b>I</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Sub Kegiatan yang terlaksana</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1).Persentase Ketersediaan Alat dan Bahan Kelistrikan Penerangan Bangunan Kantor
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1).Persentase Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1).Persentase Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga di Sarana Kesehatan
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1).Persentase Ketersediaan BBM dan Logistik Lainnya Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1).Persentase Ketersediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1).Persentase Sumber Bacaan Surat Kabar Harian
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1).Persentase Kecukupan Biaya Perjalanan Untuk Konsultasi dan Supervisi

<b>I</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan Barang yang dilaksanakan sesuai rencana</b>
1	Pengadaan Mebel	1).Persentase Ketersediaan Meubelair Pada Sarana Kesehatan
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PEmenuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PEmenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>I</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1).Persentase Tersedianya materai
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1).Persentase Tersedianya Biaya Jasa Kebutuhan Listrik,Air dan Telepon
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia
<b>I</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai rencana</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1).Persentase Tersedianya Biaya Perpanjangan Izin Kelayakan Jalan/STNK Kendaraan Dinas
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1).Persentase Tersedianya Biaya Perpanjangan Izin Kelayakan Jalan/STNK Kendaraan Dinas
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1).Persentase Bangunan/Gedung Kantor Pelayanan Yang Terpelihara

5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1).Persentase Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Dipelihara
<b>I</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Oganisasi yang dikelola</b>
1	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	jumlah upt yang melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Sumber : Renja 2021.

Program di atas kemudian dijabarkan kembali menjadi kegiatan organisasi yang disusun dengan dimensi tahunan. Kegiatan-kegiatan strategis tersebut merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian dan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Kesehatan. Namun demikian masih dimungkinkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain sebagai kegiatan penunjang, yaitu kegiatan yang tidak berkaitan langsung bagi pencapaian dan pelaksanaan visi dan misi organisasi. Kegiatan penunjang tersebut dapat dilakukan secara rutin/berkala tanpa harus dimasukkan ke dalam dokumen rencana strategis.

### **C. PERJANJIAN KINERJA**

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Penetapan Kinerja Tahun 2021 merupakan tahun kelima Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, sehingga capaian kinerja tahun 2021 ini mencerminkan capaian awal renstra 2016-2021. Penetapan Kinerja Tahun 2021.

**Tabel : 2.5 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Unit Layanan	100
2	Menurunkan jumlah kematian ibu maternal	Jumlah kematian ibu	5
		Presentase cakupan pelayanan nifas (KF)	95
3	Meurunkan jumlah kematian neonatal, bayi dan balita	Angka kematian neonatus per 1000 kelahiran hidup	8
		Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	7
		Angka kematian balita per 1000 lahiran hidup	10
4	Meningkatnya status gizi pada masyarakat khususnya balita	Prevalensi balita gizi kurang dan buruk (persen)	7%
5	Peningkatan kualitas manajemen dan mutu pelayanan kesehatan	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu,pusban per 1000 penduduk	1
		Presentase keterdiaan sarana pelayanan kesehatan di desa	100
		Puskesmas terakreditasi madya	0
6	Meningkatkan kecukupan SDM kesehatan disetiap jenjang pelayanan	Rasio dokter, dokter gigi per 100000 penduduk	50
		Presentase puskesmas memiliki tenaga kesehatah sesuai standar	100
7	Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular	Persentase desa UCI	95
		Menurunnya prevalensi kasus TBC	224 per 100.000 pddk
		Jumlah penemuan kasus pneumonia pada balita	15

		Jumlah desa melaksanakan STBM	80
		Jumlah Kasus KLB	0
8	Meningkatnya pelayanan kesehatan usila	Usia harapan hidup	75,5
9	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	Presentase keluarga sehat	80
		Presentase desa sehat	80
		Presentase desa sehat	95
10	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program	Capaian program dan kegiatan sesuai dengan sasaran	95
11	Meningkatkan sarana prasarana, disiplin dan sumber daya aparatur guna pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik.	Presentase sarana dan prasarana kesehatan	100
		Presentase capaian penilaian review terhadap akuntabilitas dan kinerja OPD	>95

Sumber : Perjanjian kinerja tahun 2021

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA**

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat menggambarkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia. Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing, UPTD Puskesmas, bidang, dan sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Paser sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser tahun 2019 ditargetkan untuk dicapai. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form pengukuran kinerja yang mencerminkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser tahun 2021.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian terget indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Rumus diatas memberikan penjelasan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja



$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi-target})}{\text{Target}} \times 100 \text{ persen}$$

Berdasarkan rumus tersebut semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja

Untuk sasaran strategis dimana keberhasilan kinerja dilihat dari menurunnya jumlah kasus atau kesakitan, dan atau meningkatnya cakupan pelayanan, persentase capaian Indikator Kinerja Utama dapat melebihi 100 persen

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan, nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Nilai Capaian Kinerja dan Interpretasinya**

No	Capaian Kinerja	Interprestasi
1	> 100 %	Melebihi/melampaui target (Baik sekali)
2	> 75-100 %	Sesuai target (Baik)
3	55 – 75 %	Tidak mencapai target (Cukup)
4	< 50 %	Tidak mencapai target (kurang)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Laporan Dinas Kesehatan

Kabupaten Paser ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2021, telah ditetapkan 11 (sasaran sasaran dengan 24 indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sasaran 1, terdiri dari 1 indikator;
- b. Sasaran 2, terdiri dari 2 indikator;
- c. Sasaran 3, terdiri dari 3 indikator;
- d. Sasaran 4, terdiri dari 2 indikator;
- e. Sasaran 5, terdiri dari 3 indikator.
- f. Sasaran 6, terdiri dari 2 indikator
- g. Sasaran 7 terdiri dari 5 indikator
- h. Sasaran 8 terdiri dari 1 indikartor
- i. Sasaran 9 terdiri dari 3 indikator
- j. Sasaran 10 terdiri dari 1 indikator
- k. Sasaran 11 terdiri dari 2 indikator

## **B. PENGUKURAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA**

Implementasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Paser 2016-2021 yang efektif dan efisien sangat diperlukan dalam pembangunan daerah Dokumen Rencana Pembangunan bidang kesehatan yang disusun harus sistematis, akuntabel dengan mengakomodir kepentingan masyarakat dan stakeholder Dinas Kesehatan Kabupaten Paser. Sasaran diukur dengan menggunakan

indikator yang jelas, keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD.

### 1. Pengukuran Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2021 secara keseluruhan disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2021.**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	%
1	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Unit Layanan	100	97,6	97,6%
2	Menurunkan jumlah kematian ibu matdernal	Jumlah kematian ibu	5	20	25%
		Presentase cakupan pelayanan nifas (KF)	95	108,6	114,3%
3	Menurunkan jumlah kematian neonatal, bayi dan balita	Angka kematian neonatus per 1000 kelahiran hidup	8	10,1	73,8%
		Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	7	11	42,9%
		Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	10	11,7	83,0%
4	Meningkatnya status gizi pada masyarakat khususnya balita	Menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan buruk (persen)	7%	7,8%	89%
5	Peningkatan kualitas manajemen dan mutu pelayanan kesehatan	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu,pusban per 1000 penduduk	1	0,64	64,0%
		Presentase ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di desa	100	98	98,0%
		Puskesmas terakreditasi madya	0	15	100,0%
6	Meningkatkan kecukupan SDM kesehatan disetiap jenjang pelayanan	Rasio dokter, dokter gigi per 100000 penduduk	50	30,88	61,8%
		Presentase puskesmas memiliki tenaga kesehatan	100	75	75,0%

		sesuai standar			
7	Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular	Persentase desa UCI	95	66	69,5%
		Menurunnya prevalensi kasus TBC	224 per 100.000 pddk	135 per 100.000 pddk	165,9%
		Jumlah penemuan kasus pneumonia pada balita	15	57	100,0%
		Jumlah desa melaksanakan STBM	80	72	90,0%
		Jumlah Kasus KLB	0	0	100,0%
8	Meningkatnya pelayanan kesehatan usila	Usia harapan hidup	75,5	72,88	96,5%
9	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	Presentase keluarga sehat	80	63,22	79,0%
		Presentase desa sehat	80	72	90,0%
		Presentase desa siaga	95	85	89,5%
10	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program	Capaian program dan kegiatan sesuai dengan sasaran	95	80	84,2%
11	Meningkatkan sarana prasarana, disiplin dan sumber daya aparatur guna pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik.	Presentase sarana dan prasarana kesehatan	100	55	55,0%
		Presentase capaian penilaian review terhadap akuntabilitas dan kinerja OPD	>95		

Berdasarkan Tabel 3.2 rata-rata capaian indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Paser pada tahun 2021 sebesar **88,35 persen** atau **bermakna Baik (sesuai target)**

## **2. Analisis Efisiensi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Paser**

Analisis efisiensi penggunaan anggaran menampilkan data anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai

>100%.

Gambaran efesiensi penggunaan anggaran dan sumber daya disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3. Tingkat Efesiensi Penggunaan Anggaran Dinas Kabupaten Paser 2021.**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	% (Realisasi Capaian Anggaran)	% (Realisasi Capaian Kinerja)	% (Tingkat Efisiensi)
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			
1	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.55	100	143.7
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90.53	100	110.46
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.02	100	123.4
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93.95	100	106.4
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.68	100	118.09
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.51	87.7	128.01
<b>B</b>	<b>PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN (UKP) DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)</b>			
7	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	77.08	96.3	124.9
8	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.9	55.8	159.8
9	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	54.61	62.1	113.7

10	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.08	100	123.3
C	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>			
11	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	91.77	92	100.2
12	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	83.87	97.3	116.01
D	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>			
13	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	89.06	87	97.06
14	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	71.64	100	139.05
15	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	59.12	66.6	112.6
16	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	99.53	100	100.4
17	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri	36.28	55	151.5

	Rumah Tangga			
E	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>			
18	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.66	66.15	123.2
19	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.49	62.8	102.1
20	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.56	89.5	155.4
21	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	97.25	80	82.2
	JUMLAH	49.85	88.07	176.6

### 3. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Paser disajikan sebagai berikut :

#### Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase peserta jaminan pemeliharaan kesehatan di unit layanan	%	97	94	96.9	100	97,6	97,6%

Tabel 3.4 di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, ada peningkatan

realisasi kinerja dari 96,9 persen tahun 2020 naik menjadi 97.6 pada tahun 2021. Peningkatan kemungkinan disebabkan :

- Pemutakhiran data penerima bantuan iuran (PBI) penerima kartu JKN, dan non PBI.

### **Solusi**

- Perencanaan alokasi anggaran kembali pada tahun berikutnya untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin termasuk pelayanan pengguna Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk miskin terutama Tambahan anggaran PBI bersumber dana APBD Kabupaten Paser untuk menambah jumlah kuota penerima manfaat PBI

**Tabel 3.5 Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
Menurunnya jumlah kematian ibu maternal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah kematian ibu	%	6 kasus	5 kasus	116.6	5 kasus	20 kasus	25%
2	Presentase cakupan pelayanan nifas	%	90	88.41	98.2	95	108,6	114,3%

Tabel 3.5 dapat diketahui bahwa realisasi kinerja kematian ibu maternal, tahun 2020 sebesar 5 kasus terjadi kenaikan kematian ibu pada tahun 2021 sebesar 20 kasus.

### **Permasalahan :**

1. Sejumlah kematian ibu tersebut 9 kasus diantaranya terdiagnosa terpapar covid 19, sedangkan sisanya disebabkan karena pendarahan, hipertensi kehamilan
2. Akibat pandemic covid 19 pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga dilakukan penundaan karena adanya pembatasan



kegiatan.

- Ibu hamil tidak melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin di faskes dikarena takut di swab atau takut terpapar covid ini ditunjukkan dengan angka capaian K4 yang rendah pada tahun 2021.

**Solusi :**

- Peningkatan dan perbaikan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan keluarga.
- Advoksi, edukasi dan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kesehatan ibu hamil

**Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran 3**

Jumlah kematian neonatal, bayi dan balita

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Angka kematian neonatus per 1000 kelahiran hidup	%	9	6.67	115.6	8	10,1	73,8%
2	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	%	8	8.47	94.12	7	11	42,9%
3	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	%	11	4.37	160.2	10	11,7	83,0%

Capaian kinerja Angka kematian neonatus mengalami penurunan dari 115,6 % pada tahun 2020 menjadi 73,8 % pada tahun 2021 ; angka kematian bayi mengalami penurunan dari 94.12 persen tahun 2020 turun menjadi 42.9 persen pada tahun 2021 ; serta Angka kematian balita juga mengalami penurunan yang pada tahun 2020 160,2 % pada tahun 2021 menjadi 83 ,0 % (Tabel 3.5) penurunan ini kemungkinan disebabkan kualitas pelayanan kesehatan pada bayi dan Balita masa pandemic covid 19 mengalami penurunan.

**Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Indikator 4**

Meningkatnya status gizi pada masyarakat khususnya balita

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Prevalensi balita gizi kurang dan buruk (persen)	%	8	2	175	7	7,8	89%

Prevalensi gizi kurang dan buruk belum terpenuhi dari target 7 persen capaian 7.8 persen pada tahun 2021 (Tabel 3.7) akan sehingga capaian kinerja prevalensi status gizi mengalami penurunan dari 175 persen pada tahun 2020 turun menjadi 89% persen pada tahun 2021, penurunan capaian kinerja kemungkinan disebabkan :

1. Penundaan/pembatasan kegiatan posyandu akibat pandemic covid 19, sehingga data capaian kegiatan menjadi menurun. Hal ini diperkuat dengan data presentase balita yang datang ke posyandu pada tahun 2021 baru mencapai 47.2 persen.
2. Kegiatan pelayanan kesehatan pada balita juga mengalami penurunan.

**Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran 5**

Meningkatnya kualitas manajemen dan mutu pelayanan kesehatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu, pusban per 1000 penduduk	%	0.9	0.48	53.4	1	0,64	64,0%
2	Presentase keterdiaan sarana pelayanan kesehatan di desa	%	65	60	92.30	100	98	98,0%
3	Puskesmas terakreditasi madya	%	10	15	150	0	15	100,0%

Tabel 3.7 dapat diketahui bahwa sasaran kinerja meningkatnya kualitas manajemen dan mutu pelayanan kesehatan terjadi peningkatan indikator kinerja pada ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dari 92.30 tahun 2020, menjadi 98 persen tahun 2021, kenaikan ini disebabkan beberapa hal antara lain :

- Keterlibatan desa melalui anggaran desa untuk membangun fasilitas pelayanan di desa ( poskesdes ) serta pemenuhan prasarana dan alat kesehatan nya.
- Jumlah prasarana serta alkes esensial walaupun kecukupan belum memadai tetapi sudah mulai terdistribusi ke seluruh wilayah pusban, polindes, dan poskesdes.

**Solusi**

- Dukungan anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, dukungan dunia usaha dan keterlibatan lintas sector dalam penanganan masalah kesehatan.

**Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Sasaran 6**

Meningkatnya kecukupan SDM kesehatan disetiap jenjang pelayanan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Rasio dokter, dokter gigi per 100.000 penduduk	%	35	25.5	72.8	50	30,88	61,8%
2	Presentase puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%	75	50	66.6	75	75	100

Tabel 3.9 sasaran kinerja meningkatnya kecukupan SDM kesehatan disetiap jenjang pelayanan terjadi peningkatan realisasi kinerja pada indikator rasio dokter tahun 2020 sebesar 25,5 naik menjadi 30,88 tahun 2021. Namun terlihat menurun pada capaian

kinerja 2021 dikarenakan tingginya target dari 35 pada tahun 2020 menjadi 50 pada tahun 2021 Peningkatan ini disebabkan beberapa hal antara lain :

- Penerimaan CPNS bidang kesehatan pada tahun 2021 dan mulai didistribusikan ke seluruha fasilitas pelayanan kesehatan.
- Rekrutmen dokter/dokter gigi melalui perjanjian kerja ( Honor PTT)

Tabel 3.10 **Analisis Pencapaian Sasaran 7**

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase desa UCI	%	92	70.8	81.4	95	66	69,5%
2	Menurunnya prevalensi kasus TBC	%	226 per 100000 pddk	176 per 100000 pddk	126.5	224 per 100.000 pddk	135 per 100.000 pddk	165,9%
3	Jumlah penemuan kasus pneumonia pada balita	%	220	216	98.18	15	57	100,0%
4	Jumlah desa melaksanakan STBM	%	72	54	75	80	72	90,0%
5	Jumlah Kasus KLB	%	1	0	100	0	0	100,0%

Tabel 3.10 sasaran kinerja menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular terjadi penurunan capaian kinerja pada indikator desa UCI dari 81,4 persen tahun 2020 turun menjadi 69,5 persen pada tahun 2021. Penurunan capaian kinerja ini disebabkan beberapa hal antara lain :

- Pembatasan kegiatan imunisasi bayi/balita akibat pandemic covid 19.
- Tenaga vaksinator puskesmas juga pelaksana vaksin covid-19

Tabel 3.11 **Analisis Pencapaian Sasaran 8**

Meningkatnya pelayanan kesehatan usila

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Usia harapan hidup	%	74.8	73.38	98,1	75,5	72,88	96,5%

Tabel 4.1 diketahui bahwa indikator kinerja usia harapan hidup mengalami penurunan dari 98.1 persen (**baik**) pada tahun 2021, turun menjadi 96,5 persen (**Baik**) pada tahun 2021.

Hal ini tidak terlepas dari kondisi pandemi covid-19 dimana tingginya kasus kematian akibat paparan covid -19 pada tahun 2021 serta adanya peningkatan kematian ibu bayi dan balita AKI dan AKB

Tabel 3.12 **Analisis Pencapaian Sasaran 9**

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Presentase keluarga sehat	%	0.5	0.17	34	80	63,22	79,0%
2	Presentase desa sehat	%	72	54	75	80	72	90,0%
3	Presentase desa siaga	%	85	60	70.5	95	85	89,5%

Tabel 3.12 diketahui bahwa sasaran kinerja kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat (PHBS) rata rata mengalami peningkatan, Peningkatan ini disebabkan karena data hasil kegiatan kunjungan rumah bagi keluarga kurang sehat berdasarkan 12 indikator pada PIS-PK dilakukan update data secara berkesinambungan, demikian juga dengan indikator desa sehat dan desa siaga mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel 3.13 **Analisis Pencapaian Sasaran 10**

Terlaksananya kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Capaian program dan kegiatan sesuai dengan sasaran	%	80	82	102.5	95	80	84,2%

Tabel 3.13 diketahui capaian kinerja sasaran terlaksananya kegiatan sesuai dengan perencanaan yang mendukung keberhasilan program dengan indikator kinerja capaian program dan kegiatan sesuai dengan sasaran mengalami penurunan dari 102.5 persen tahun 2020 turun menjadi 84,2 persen pada tahun 2021. Penurunan ini disebabkan karena adanya kenaikan target dan pembatasan kegiatan karena pandemi sehingga rata-rata pelaksanaan program efektif dalam melaksanakan kegiatan +/- 7 bulan .

Tabel 3.14 **Analisis Pencapaian Sasaran 11**

Meningkatkan sarana prasarana, disiplin dan sumber daya aparatur guna pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Presentase sarana dan prasarana kesehatan	%	65	58.55	90.07	100	55	55,0%
2	Presentase capaian penilaian review terhadap akuntabilitas dan kinerja OPD	%	>85		0	>95	0	0

Tabel 3.14 capaian kinerja sasaran sarana prasarana, disiplin

dan sumber daya aparatur guna pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik pada indikator penilaian review akuntabilitas kinerja OPD tidak ada capaian kinerja nilai kegiatan ini didasarkan pada penilaian inspektorat.

## **B. CAPAIAN KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

Standar pelayanan minimal bidang kesehatan (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dinas Kesehatan Kabupaten Paser mempunyai tanggungjawab untuk menjamin setiap warga Negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggungjawab setiap warga Negara. Berikut capaian kinerja standar pelayanan minimal (SPM) Tahun 2021

Tabel 3.15 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2021

<b>NO</b>	<b>Layanan</b>	<b>Jumlah Penerima layanan (Target sasaran)</b>	<b>Total penerima layanan (Realisasi)</b>	<b>Capaian (%)</b>
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5,177	5,213	100.6954
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	4,939	5,192	105.1225
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	5,696	2,233	39.20295
4	Pelayanan kesehatan balita	37,117	7,747	20.87184
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	9,715	1,942	19.98971
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	123,357	36,602	29.6716
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	16,541	7,728	46.72027
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	51,563	8,507	16.49826
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	2,344	2,526	107.7645
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	314	282	89.80892
11	Pelayanan kesehatan orang dengan terduga/suspek TB	4,894	1,049	21.43441
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	9,636	6,952	72.14612

## **C. REALISASI ANGGARAN**

### **1. Pengukuran Realisasi Anggaran Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.**

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Pada tahun 2021 terdiri atas Belanja Urusan Kesehatan dan belanja Urusan Penunjang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 serta Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 06 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021, untuk melihat pembiayaan selama tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

Pagu Anggaran Tahun 2021 termasuk anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 178.594.270.154 ( seratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah ), dengan rincian :



**Tabel 3.16 Rincian Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2021**

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Urusan Penunjang	110.166.917.737	109.256.830.472	99,2
2	Urusan Kesehatan	68.427.352.417	56.010.952.864	82,9
	<b>TOTAL</b>	<b>178.594.270.154,00</b>	<b>165.267.783.336</b>	<b>92,5</b>

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2021

Belanja Urusan Penunjang termasuk di dalamnya belanja gaji dan Tunjangan ASN dan belanja Urusan Kesehatan termasuk belanja jaminan kesehatan nasional merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, belanja urusan Kesehatan tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam mencapai sasaran pembangunan. Rincian realisasi anggaran belanja berdasarkan sasaran, program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2021**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.935.650	56.291.010	69,55%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	108.357.672.700	107.814.376.212	99,50%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	617.208.969	601.167.725	97,40%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	698.813.888	625.905.850	89,57%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.286.530	159.089.675	38,59%

<b>B</b>	<b>PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN (UKP) DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)</b>			
6	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.630.114.989	5.773.691.231	66,90%
7	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.498.618.328	34.656.625.274	83,51%
8	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	103.365.600	65.722.400	63,58%
9	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.954.401.000	2.369.946.100	80,22%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>			
10	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	14.348.140.000	12.425.177.753	86,60%
11	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	311.507.800	261.276.200	83,87%
<b>D</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>			
12	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	44.638.000	39.756.106	89,06%
13	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	97.684.300	69.983.950	71,64%
14	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	55.440.000	32.778.000	59,12%
15	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	72.360.000	72.020.000	99,53%
16	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	49.268.000	17.875.050	36,28%

<b>E</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>			
17	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	166.078.000	136.292.800	82,07%
18	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.173.400	58.080.000	96,52%
19	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.563.000	31.728.000	89,22%
	<b>TOTAL</b>	<b>178.594.270.154</b>	<b>165.267.783.336</b>	<b>92,54%</b>

Sumber : Simda Keuangan Tahun 2021

### **1.3.2. Analisis Keuangan Kaitannya dengan Pencapaian Kinerja Program Kegiatan**

Penyerapan anggaran keuangan pada masing-masing program dan kegiatan sebagaimana tabel 3.17 tersebut diatas jika dihubungkan dengan pencapaian kinerja program kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.18. Pencapaian Realisasi Anggaran vs Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		%	CAPAIAN KINERJA		%
		PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.935.650	56.291.010	69,55%	100	100	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	108.357.672.700	107.814.376.212	99,50%	100	100	100,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	617.208.969	601.167.725	97,40%	100	100	100,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	698.813.888	625.905.850	89,57%	100	100	100,00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.286.530	159.089.675	38,59%	90	79	87,78
<b>B</b>	<b>PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN (UKP) DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)</b>						
6	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	8.630.114.989	5.773.691.231	66,90%	83	80	96,39

	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
7	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.498.618.328	34.656.625.274	83,51%	100	55,8	55,80
8	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	103.365.600	65.722.400	63,58%	100	62,1	62,10
9	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.954.401.000	2.369.946.100	80,22%	100	100	100,00
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>						
10	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	14.348.140.000	12.425.177.753	86,60%	100	92	92,00
11	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	311.507.800	261.276.200	83,87%	75	73	97,33
<b>D</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>						

12	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	44.638.000	39.756.106	89,06%	100	87	87,00
13	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	97.684.300	69.983.950	71,64%	40	40	100,00
14	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	55.440.000	32.778.000	59,12%	30	20	66,67
15	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	72.360.000	72.020.000	99,53%	100	100	100,00
16	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	49.268.000	17.875.050	36,28%	40	22	55,00
<b>E</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>						

17	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	166.078.000	136.292.800	82,07%	65	43	66,15
18	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.173.400	58.080.000	96,52%	25	15,7	62,80
19	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.563.000	31.728.000	89,22%	48	43	89,58
	<b>TOTAL</b>	<b>178.594.270.154</b>	<b>165.267.783.336</b>	<b>92,54%</b>			<b>85,19</b>

Sumber : Simda Keuangan dan laporan evaluasi Renja 2021

### 3.3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dan Realisasi Keuangan Tahun , Tahun 2017, 2018, Tahun 2019 Tahun 2020 dan Tahun 2021

Perbandingan capaian kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Kinerja (%)</b>	<b>Realisasi Keuangan (%)</b>
1	2017	89,42	84.18
2	2018	98,38	85.74
3	2019	90.4	82.46
4	2020	96.2	77.8
5	2021	85,19	92,54

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel 3.19 realisasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser mengalami penurunan dari 96.2 pada tahun 2020, turun menjadi 85,19 persen tahun 2021,



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Paser telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan pada beberapa sasaran kinerja utama dengan nilai rata-rata **88,35** walaupun beberapa kegiatan capaian kinerja dibawah target tahunan. Adapun Realisasi keuangan tahun 2021 mencapai 92,54 dan realisasi kinerja program dan kegiatan 85,18 persen

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 sudah dapat dipenuhi sesuai dengan harapan, ini menunjukkan perencanaan yang disusun dapat di implementasikan sesuai dengan visi, misi, tujuan sasaran dan strategi dan kebijakan dinas kesehatan.

### **4.2. UPAYA PEMECAHAN MASALAH**

Sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang senantiasa berkembang menjadi tantangan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dirasakan perlu diupayakan untuk memperkuat peran Dinas Kesehatan Kabupaten Paser. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah :

1. Mengembangkan proses penyusunan perencanaan sampai pada unit terkecil jejaring Dinas Kesehatan Kabupaten Paser yang telah dimiliki oleh Dinas Kesehatan serta mendorong tumbuhnya

sistim perencanaan secara bottom up yang berbasis data yang diharapkan dapat menghasilkan program kegiatan berkualitas sesuai kondisi wilayah setempat yang membawa Dinas Kesehatan menjadi institusi yang kredibel dan profesional.

- 2 Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Secara internal dapat dimulai dengan sinergitas, sinkronisasi kegiatan masing-masing bidang dan seksi, evaluasi mekanisme kerja masing-masing bidang serta penataan koordinasi dan administrasi yang berada dibawah kendali sekretariat.
- 3 Optimalisasi, sistim perencanaan, pelaporan dan kegiatan berbasis teknologi yang dapat dikembangkan sebagai upaya untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan aktual untuk mendukung kualitas perencanaan,.

Akhirnya Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat dan motivasi untuk memacu pelaksanaan tugas masing-masing dengan menata kembali seluruh sumber daya yang dimiliki yang berada dalam tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Paser sehingga secara nyata dapat berguna bagi perbaikan kinerja organisasi.